

PENGARUH TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN DENGAN PARTISIPASI MASYARAKAT SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Siswanto⁵

iwansiswanto384@gmail.com

Yundy Hafizrianda⁶

hariman.andalan@gmail.com

Alfiana Antoh⁷

alfiantoh@gmail.com

Abstract

The Influencing of Public Policy Transparency for Improving the Capability on Budget Public Participation for the Member of Parliaments by Using Moderation Variable. (Case study of Member of Parliament Keerom). The purpose of the study was to investigate the effect of public policy transparency on improving the understanding of Member of Parliament in relation to public budgeting. Survey was conducted to obtain data where the author distributed questionnaires to the respondents. By using regression equation, the study found that the influencing of transparency public policy on the capability of the Member of Parliaments was a significant where indicated the t value (1.350) higher than t table (0.188) with the significant level 0.05. In addition, the influencing of community participation as variables moderate and transparency in public policy showed that there was a positive relationship between transparency public policy and capability of the Member of Parliament on budget.

Keywords: *public policy of transparency, public participation, knowledge about the council budget*

PENDAHULUAN

Perubahan sistem politik, sosial, dan kemasyarakatan serta ekonomi yang dibawa oleh arus reformasi telah menimbulkan tuntutan yang beragam terhadap tata kelola pemerintahan yang baik. Reformasi yang diperjuangkan oleh seluruh lapisan masyarakat

⁵ Alumni Mahasiswa Magister Keuangan Daerah Universitas Cenderawasih

⁶ Staf Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih

⁷ Staf Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih

membawa perubahan dalam kehidupan politik nasional maupun di daerah. Salah satu agenda reformasi tersebut adalah adanya desentralisasi keuangan dan otonomi daerah. Salah satu aspek penting dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi adalah masalah keuangan daerah dan anggaran daerah (APBD). Untuk mewujudkan otonomi daerah dan desentralisasi yang luas nyata dan bertanggung jawab membawa perubahan pada pola dan sistem pengawasan dan pemeriksaan. Perubahan pada pola pengawasan terkait dengan diberinya keleluasan kepada pemda untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, maka diperlukan manajemen keuangan daerah yang mampu mengontrol kebijakan keuangan secara ekonomis, efisien, transparan, dan akuntabel.

Implikasi positif dari berlakunya Undang-undang tentang otonomi daerah yang berkaitan dengan kedudukan, fungsi dan hak-hak DPRD, mengharapkan DPRD yang selanjutnya disebut dewan lebih aktif didalam menangkap aspirasi yang berkembang dimasyarakat, yang kemudian mengadopsinya dalam berbagai bentuk kebijakan publik didaerah bersama-sama Kepala Daerah (Bupati dan Walikota). Sehubungan dengan hal tersebut, maka peran dari anggota dewan menjadi semakin strategis dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah dengan cara mengawasi penggunaan keuangan daerah (APBD).

Keberhasilan otonomi daerah tidak lepas dari kemampuan dalam bidang keuangan yang merupakan salah satu indikator penting dalam menghadapi otonomi daerah. Disisi lain, kedudukan dan peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah ditempatkan pada posisi yang sangat strategis, karena berdasarkan Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 menyebutkan bahwa peran DPRD sebagai badan legislatif daerah yang

berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari pemerintah daerah. Pada kenyataannya masih terdapat permasalahan dan kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah dari aspek lembaga-lembaga legislatif, yaitu masih rendahnya peranan DPRD dalam keseluruhan proses atau siklus anggaran, baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pelaporan maupun pengawasan program kerja eksekutif.

Penyusunan kebijakan daerah yang sangat tepat tergantung pada pengetahuan dan kecakapan DPRD. Pengetahuan yang dibutuhkan dalam mewujudkan akuntabilitas publik melalui anggaran adalah pengetahuan tentang anggaran, dengan mengetahui tentang anggaran diharapkan anggota dapat mendeteksi pemborosan dan kebocoran anggaran.

Transparansi kebijakan publik merupakan prinsip yang menjamin kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan atau keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat.

Pengawasan anggaran yang dilakukan oleh dewan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal (Pramono, 2002). Faktor internal adalah faktor yang dimiliki oleh dewan yang berpengaruh secara langsung terhadap pengawasan yang dilakukan oleh dewan, salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran. Sedangkan faktor eksternal adalah pengaruh dari pihak luar terhadap fungsi pengawasan oleh dewan yang berpengaruh secara tidak langsung terhadap pengawasan yang dilakukan oleh dewan, diantaranya adalah adanya partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik.

Peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Werimon (2005) menemukan bahwa pengetahuan anggaran berpengaruh positif

signifikan terhadap pengawasan APBD yang dilakukan oleh dewan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pengawasan anggaran terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dipengaruhi oleh pengetahuan yang dimiliki oleh DPRD.

Keterbatasan waktu, tenaga, dan informasi yang dimiliki oleh DPRD Kabupaten Keerom juga dapat berdampak pada rendahnya kualitas pengawasan anggaran. Transparansi kebijakan publik dipandang akan mampu untuk menambah informasi melalui umpan balik dari kelompok masyarakat kepada DPRD untuk memaksimalkan proses pengawasan terhadap anggaran daerah. Untuk itu, melalui transparansi kebijakan publik dengan menyebarkan informasi kebijakan anggaran kepada masyarakat dan mempermudah akses terhadap dokumen anggaran diharapkan dapat memberikan informasi penting seperti indikasi kebocoran anggaran, pelaksanaan anggaran yang tidak sesuai dengan peraturan, kesesuaian program dengan hasil musrenbang dan informasi-informasi penting lainnya, baik langsung maupun tidak langsung kepada DPRD yang pada akhirnya akan melahirkan tindakan atau langkah konkrit karena DPRD mengetahui fakta dari permasalahan-permasalahan anggaran secara komprehensif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Untuk memberikan bukti empiris bahwa transparansi kebijakan publik berpengaruh terhadap pengetahuan dewan tentang anggaran. 2) Untuk memberikan bukti empiris bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap hubungan antara transparansi kebijakan publik dengan pengetahuan dewan tentang anggaran. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pemerintah daerah Kabupaten Keerom dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah khususnya akan meningkatkan peran DPRD dalam transparansi kebijakan publik dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good government) dan dapat dijadikan

acuan bagi partai politik pada saat merekrut anggota dewan dan pengembangan kader partai.

TINJUAN PUSTAKA

Pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan tahap pada penyusunan dan laporan APBD. Pengawasan diperlukan pada setiap tahap bukan hanya pada tahap evaluasi saja (Mardiasmo, 2001). Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan dimulai pada saat proses penyusunan APBD, pengesahan APBD, pelaksanaan APBD, pelaksanaan APBD dan pertanggungjawaban APBD.

Menurut Fatchurrochman (2002) pengawasan eksternal adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh suatu unit pengawasan yang sama sekali berasal dari luar lingkungan organisasi eksekutif. Dengan demikian antara pengawasan dengan pihak yang diawasi tidak terdapat hubungan kedinasan. Di Indonesia fungsi pengawasan eksternal dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan secara langsung oleh masyarakat. Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan dapat berupa pengawasan secara langsung dan tidak langsung.

Peneliti terdahulu yang telah dilakukan Sopanah (2003) mengenai pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah: penelitian dilakukan di Malang Raya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD yang dilakukan oleh Dewan. pengaruh yang ditunjukkan adalah positif, artinya semakin tinggi pengetahuan dewan tentang anggaran maka pengawasan yang dilakukan semakin meningkat. Disamping itu, interaksi pengetahuan anggaran

dengan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD yang dilakukan oleh dewan. Sedangkan interaksi pengetahuan dewan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengawasan yang dilakukan dewan.

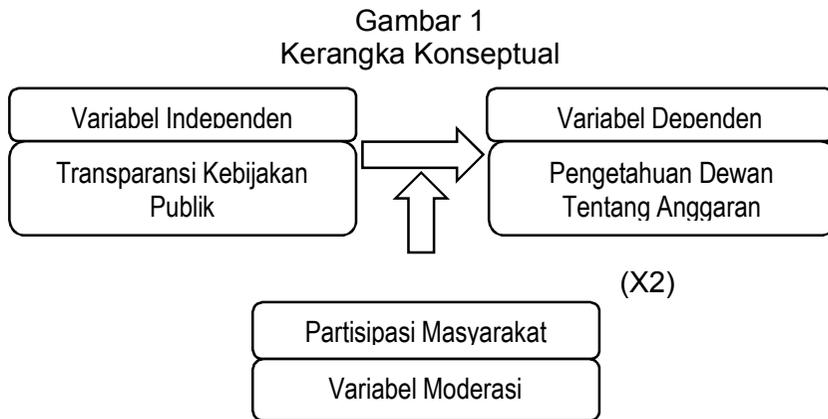
Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Werimon (2005). Komitmen Pemerintahan yang baru, untuk mengelola pemerintahan yang bersih dan berpihak pada kepentingan publik serta ketidaksignifikan transparansi kebijakan publik terhadap pengawasan keuangan daerah yang merupakan tuntutan agenda reformasi, menjadi suatu permasalahan yang menarik untuk dikaji kembali. Peneliti terdahulu yang telah dilakukan oleh Werimon (2005) mengenai Pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD) penelitian dilakukan di Provinsi Papua.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). Selain itu, interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat berpengaruh negatif signifikan terhadap pengawasan APBD. interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan APBD. Interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan APBD.

KERANGKA KONSEPTUAL

Berdasarkan telaah literatur diatas maka model penelitian yang berjudul "Pengaruh Transparansi Kebijakan Publik Terhadap

Kapasitas Dewan Tentang Anggaran Dengan Partisipasi Masyarakat Sebagai Variabel Moderasi” dapat digambarkan sebagai berikut:



HIPOTESIS PENELITIAN

Berdasarkan uraian dari tinjauan dan penelitian terdahulu, maka dapat dilakukan hipotesis sebagai berikut:

- H1 : Transparansi kebijakan publik berpengaruh positif terhadap pengetahuan dewan tentang anggaran.
- H2 : Partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap hubungan antara transparansi kebijakan publik dengan pengetahuan Dewan tentang anggaran anggaran.

METODE PENELITIAN

Kuisisioner yang digunakan dikembangkan dari penelitian yang dilakukan oleh Werimon (2005). Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dalam bentuk persepsi responden yang diperoleh melalui pendistribusian kuisisioner secara langsung kepada responden pada DPRD Kabupaten Keerom, sedangkan data sekunder berasal dari Sekretariat Dewan pada DPRD Kabupaten Keerom.

1. Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah lembaga DPRD Kabupaten Keerom. Data sekunder tentang jumlah anggota DPRD kabupaten diperoleh dari sekretariat DPRD Kabupaten Keerom. Jumlah anggota DPRD Kabupaten Keerom sebanyak 20 (dua puluh ditambah dengan tenaga ahli sebanyak 10 orang).

2. Sampel Penelitian

Dalam pengambilan sampel ini dilakukan secara non random dengan purposive sampling yaitu pengambilan sampel dengan berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti. Dengan kriteria sampel yang digunakan untuk sampel daerah/Kabupaten adalah Responden merupakan anggota dewan komisi A, komisi B, dan komisi C pada DPRD Kabupaten Keerom ditambah dengan tenaga ahli DPRD sebanyak 10 orang. Jumlah responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 30. Untuk mengantisipasi rendahnya respon rate peneliti melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Dalam kuesioner disampaikan bahwa responden tidak perlu memberikan identitas, kecuali hal-hal yang diperlukan dalam penelitian ini.
- b. Peneliti memberikan penghargaan dengan cara memberikan ringkasan peneliti jika responden menghendaki.
- c. Memberikan jaminan kerahasiaan atas jawaban yang diberikan oleh responden.

3. Variabel Penelitian

Penelitian ini dirancang sebagai suatu penelitian empiris. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengetahuan Dewan tentang anggaran, variabel dependen adalah transparansi kebijakan publik. Sedangkan partisipasi masyarakat dijadikan

variabel moderasi. Semua perhitungan dan analisa statistik dilakukan dengan piranti lunak SPSS for windows versi 17.0.

4. Instrumen Penelitian

a. Pengukuran Variabel

Masing-masing variabel diukur dengan menggunakan skala likert yaitu mengukur sikap dengan menyatakan setuju atau ketidaksetujuan responden terhadap pertanyaan yang diajukan dengan skor 5 (SS=sangat setuju), 4 (S=Setuju), 3 (TT=Tidak Tahu), 2 (TS=Tidak Setuju), dan 1 (STS=Sangat Tidak Setuju).

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuisisioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuisisioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. (Ghozali 2002, aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS). Dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan One shot Measure, karena kuisisioner penelitian yang digunakan adalah kuisisioner yang direplikasi dan respondennya berbeda. One shot Measure adalah pengukuran yang dilakukan sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. Untuk menguji reliabilitas suatu konstruk, diuji dengan uji statistik cronbach alpa (α).(Ghozali 2002). Suatu konstruk dikatakan reliable jika memberikan nilai cronbach alpha $> 0,60$ (Nunallu, 1967).

c. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuisisioner. Suatu kuisisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisisioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur

oleh kuisisioner tersebut. Uji signifikan dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk $df = n - 2$ (Ghozali 2005).

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini akan diuji dengan menggunakan analisis regresi berdasarkan uji koefisien determinasi, uji signifikan simultan (F test), uji signifikan Parameter Individual (t statistik) R square. Untuk menganalisa data, digunakan software SPSS for windows released 19.0 program. Adapun model persamaan regresi dalam penelitian ini adalah:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \varepsilon \dots\dots(1)$$

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_1 X_2 + \varepsilon \dots\dots(2)$$

Keterangan:

- Y : Pengetahuan dewan tentang anggaran
- B0 : Konstanta
- X1 : Transparansi Kebijakan Publik
- X2 : Partisipasi Masyarakat
- X1, X2 : Interaksi antara Partisipasi Masyarakat, dan transparansi kebijakan
- ε : Standar Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Deskripsi dan Analisis data

Pengumpulan data selama satu bulan yaitu pada bulan Desember, Jumlah kuisisioner yang disebarakan adalah sebanyak 30 dan keseluruhan dikembalikan secara lengkap sehingga semua kuisisioner dapat diolah. Berdasarkan data dari kuisisioner

yang dikumpulkan, menunjukkan bahwa usia responden yang mengisi kuesioner didominasi oleh responden yang berusia 31-40 tahun (46,7%) dan usia 41-50 (36,7%), sedangkan berdasarkan jenis kelamin, jumlah responden laki-laki dan perempuan masing-masing sebanyak 73,3% dan 26,7%. Tingkat pendidikan responden sebagian besar adalah SMA/Sederajat sebanyak 33,3%. Jumlah responden dengan pendidikan S1 dan S2 mencapai 30%. Pengalaman kerja kelompok responden memiliki perbedaan yang cukup besar. Sebagian besar responden memiliki pengalaman kerja atau pengalaman organisasi lebih dari 5 tahun. Pengalaman kerja responden antara 6-10 tahun mencapai 40%.

2. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dalam penelitian ini, terdiri dari nilai maksimum; nilai minimum; jumlah bobot jawaban tiap indikator; nilai mean; dan standar deviasi. Statistik deskripsi masing-masing kuesioner dari 30 responden, dibagi berdasarkan masing-masing variabel penelitian yakni menjadi tiga kelompok meliputi: 1) pengetahuan dewan tentang anggaran; 2) partisipasi masyarakat; dan 3) transparansi kebijakan.

Pengetahuan Dewan tentang Anggaran

Berdasarkan jumlah dan persentase jawaban responden terhadap variabel pengetahuan dewan tentang anggaran, pada umumnya didominasi oleh jawaban "setuju dan tidak tahu" seperti terlihat pada Tabel 1. Hasil tabulasi tersebut juga mengindikasikan bahwa tidak semua DPRD telah memiliki pengetahuan yang baik tentang anggaran. Pada Tabel 1, ditunjukkan bahwa indikator-indikator pengetahuan dewan yang cukup baik adalah pengetahuan DPRD tentang pelaksanaan APBD oleh eksekutif yang benar (pertanyaan 2); kemampuan bertanya dan mengajukan pendapat

dalam pembahasan APBD (pertanyaan 5); pengetahuan bahwa penyimpangan sering terjadi karena pengelolaan anggaran tidak sesuai dengan norma dan prinsip anggaran (pertanyaan 9); dan pengetahuan bahwa apabila terjadi surplus maka harus ditetapkan berdasarkan Perda (pertanyaan 10).

Tabel 1.
Statistik Deskripsi Frekuensi Pengetahuan Dewan
tentang Anggaran

No	Jawaban Responden	Sangat Setuju	Setuju	Tidak Tahu	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju
1	Mengetahui penyusunan APBD	6	11	13	0	0
2	Mengetahui pelaksanaan APBD	6	17	4	3	0
3	Mengetahui kebocoran Anggaran	3	12	14	1	0
4	Mampu mengidentifikasi kebocoran	3	14	11	2	0
5	Aktif dalam pembahasan APBD	7	12	11	0	0
6	Mengetahui syarat Perubahan Anggaran	3	15	11	1	0
7	Mengetahui Standar Anggaran Belanja	7	10	13	0	0
8	Mengetahui prinsip efektif, efisien	4	13	12	1	0
9	Mengetahui penyimpangan APBD	9	19	2	0	0
10	Surplus ditetapkan dengan PERDA	8	15	7	0	0

Sumber : Data diolah, 2014

Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan jumlah dan persentase jawaban responden terhadap variabel pengetahuan dewan tentang anggaran, pada umumnya didominasi oleh jawaban "setuju dan tidak tahu" seperti terlihat pada Tabel 2 Hasil tabulasi tersebut juga mengindikasikan bahwa tidak semua masyarakat telah berpartisipasi yang baik terhadap penyusunan anggaran.

Di samping nilai mean, Pada Tabel 2 di bawah, ditunjukkan bahwa indikator-indikator partisipasi masyarakat yang cukup baik adalah masyarakat selalu dilibatkan dalam konsultasi dan konfirmasi

anggota DPRD dengan pemda berkaitan dengan rancangan APBD (pertanyaan 6); forum yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi media yang efektif terhadap revisi dan pelaksanaan anggaran (pertanyaan 10); dan pertemuan kelompok masyarakat, jajak pendapat, dan kajian media massa serta diskusi publik efektif dalam penyusunan RAPBD (pertanyaan 11).

Tabel 2.
Statistik Deskripsi Frekuensi Partisipasi Masyarakat

No	Jawaban Responden	Sangat Setuju	Setuju	Tidak Tahu	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju
1	Masyarakat memberikan masukan KUA	4	11	15	0	0
2	Kritik/saran menentukan prioritas APBD	3	12	10	5	0
3	Masyarakat ikut advokasi Anggaran	1	12	17	0	0
4	Kritik/saran dipertimbangkan merubah APBD	1	10	15	4	0
5	Masyarakat mendapatkan sosialisasi perubahan APBD	5	10	15	0	0
6	Masyarakat dilibatkan dalam konsultasi APBD	1	15	14	0	0
7	Masyarakat bebas mendapat akses informasi	4	7	19	0	0
8	Masyarakat dilibatkan dalam konsultasi Publik tentang pelaksanaan APBD	3	11	15	1	0
9	Masyarakat berwenang memantau Pelaksanaan APBD	9	20	1	0	0
10	Advokasi efektif merevisi pelaksanaan anggaran	6	13	11	0	0
11	Advokasi efektif dalam penyusunan anggaran	5	23	2	0	0

Sumber : Data diolah, 2014

Transparansi Kebijakan Publik

Berdasarkan jumlah dan persentase jawaban responden terhadap variabel transparansi kebijakan publik, pada umumnya didominasi oleh jawaban "setuju dan tidak tahu" seperti terlihat pada Tabel 3. Hasil

tabulasi tersebut juga mengindikasikan bahwa tidak semua kebijakan publik telah memiliki transparansi yang baik.

Tabel 3.
Statistik Deskripsi Frekuensi Transparansi Kebijakan Publik

No	Jawaban Responden	Sangat Setuju	Setuju	Tidak Tahu	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju
1	Pengumuman anggaran meningkatkan transparansi	7	11	12	0	0
2	Kemudahan akses dokumen publik tentang anggaran	4	13	6	7	0
3	Laporan pertanggungjawaban tahunan tepat waktu	0	18	12	0	0
4	Transparansi dapat mengakomodasi dan meningkatkan suara rakyat	0	14	10	6	0
5	Sistem pemberian informasi meningkatkan transparansi	4	16	10	0	0
6	Penyebarluasan informasi melalui media massa dan komunikasi personal	2	18	10	0	0
7	Akses publik pada informasi dan mekanisme pengaduan rakyat	3	11	16	0	0
8	Respon dan tindak lanjut atas komplain dari masyarakat	5	11	11	3	0
9	Sosialisasi dewan mengenai perubahan APBD	14	13	3	0	0
10	Transparansi anggaran belum memenuhi asas transparansi	8	13	9	0	0

Sumber : Data diolah, 2014

Pada Tabel 3 di atas, menunjukkan bahwa indikator-indikator transparansi kebijakan publik yang cukup baik adalah pengumuman kebijakan anggaran kepada masyarakat dapat meningkatkan transparansi (pertanyaan 1); dengan adanya sistem pemberian informasi kepada publik dapat meningkatkan kebijakan transparansi

anggaran (pertanyaan 5); penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan dilakukan melalui media massa, maupun media komunikasi personal (pertanyaan 6); dan dewan mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai perubahan kebijakan dalam APBD yang terjadi (pertanyaan 9).

3. Pengujian Data

Validitas

Dari hasil pengujian validitas data dengan menggunakan *pearson product-moment* untuk kedua jenis pengujian hipotesis tersebut. Uji validitas terhadap variabel pengetahuan dewan tentang anggaran (10 pernyataan), hanya satu yang dinyatakan tidak valid, dengan taraf signifikansi 0,05. Pernyataan yang tidak valid adalah butir pernyataan 2 (Tabel 4) dengan probabilitas korelasi sebesar 0,108 atau lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05, sedangkan 9 pernyataan indikator pengetahuan dewan tentang anggaran dinyatakan valid karena memiliki korelasi antara masing-masing item pernyataan terhadap total skor item signifikan dengan tingkat signifikansi 0,05. Dalam pengujian selanjutnya ítem pernyataan yang tidak valid dikeluarkan dari pengujian sehingga dalam pengujian hipótesis hanya menggunakan sembilan indikator pernyataan dari variabel pengetahuan dewan tentang anggaran.

Tabel 4.
Pengujian Validitas Data Pengetahuan Dewan

NO	Korelasi antara	Nilai Korelasi (Pearson Corellation)	Probabilitas Korelasi (Sig. 2-Tailed)	Kesimpulan
1	Pertanyaan 1 dengan Total	674**	0,000	Valid
2	Pertanyaan 2 dengan Total	299**	0,108	Tidak Valid
3	Pertanyaan 3 dengan Total	607**	0,000	Valid
4	Pertanyaan 4 dengan Total	661**	0,000	Valid

No	Korelasi antara	Nilai Korelasi (Pearson Corellation)	Probabilitas Korelasi (Sig. 2-Tailed)	Kesimpulan
5	Pertanyaan 5 dengan Total	776**	0,000	Valid
6	Pertanyaan 6 dengan Total	820**	0,000	Valid
7	Pertanyaan 7 dengan Total	526**	0,003	Valid
8	Pertanyaan 8 dengan Total	650**	0,000	Valid
9	Pertanyaan 9 dengan Total	469**	0,009	Valid
10	Pertanyaan 10 dengan Total	689**	0,000	Valid

Sumber : data diolah, 2014

Uji validitas terhadap variabel partisipasi masyarakat (11 pernyataan) hanya dua pernyataan yang dinyatakan tidak valid, pada tingkat signifikansi 0,05. Terdapat 9 pernyataan indikator pengetahuan dewan tentang anggaran dinyatakan valid karena memiliki korelasi antara masing-masing item pernyataan terhadap total skor item signifikan dengan tingkat signifikansi 0,05 (pernyataan 1,3,4, 5,6,7,8,9, dan 10). Hasil pengujian validitas terhadap variabel partisipasi masyarakat dapat dilihat pada Tabel 5 di bawah.

Pernyataan yang tidak valid adalah butir pernyataan 2 dan 11 dengan probabilitas korelasi masing-masing sebesar 0,055 dan 0,300 atau lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Dalam pengujian selanjutnya item pernyataan yang tidak valid dikeluarkan dari pengujian sehingga dalam pengujian hipotesis hanya menggunakan sembilan indikator pernyataan dari variabel partisipasi masyarakat

Tabel 5.
Pengujian Validitas Data Partisipasi Masyarakat

No	Korelasi antara	Nilai Korelasi (Pearson Corellation)	Probabilitas Korelasi (Sig. 2-Tailed)	Kesimpulan
1	Pertanyaan 1 dengan Total	804**	0,000	Valid
2	Pertanyaan 2 dengan Total	354**	0,055	Tidak Valid
3	Pertanyaan 3 dengan Total	752**	0,000	Valid

No	Korelasi antara	Nilai Korelasi (Pearson Corellation)	Probabilitas Korelasi (Sig. 2-Tailed)	Kesimpulan
4	Pertanyaan 4 dengan Total	597**	0,001	Valid
5	Pertanyaan 5 dengan Total	806**	0,000	Valid
6	Pertanyaan 6 dengan Total	884**	0,000	Valid
7	Pertanyaan 7 dengan Total	615**	0,000	Valid
8	Pertanyaan 8 dengan Total	720**	0,000	Valid
9	Pertanyaan 9 dengan Total	560**	0,001	Valid
10	Pertanyaan 10 dengan Total	796**	0,000	Valid
11	Pertanyaan 11 dengan Total	196**	0,300	Tidak Valid

Sumber : data diolah, 2014

Uji validitas terhadap variabel transparansi kebijakan publik (10 pernyataan) hanya satu pernyataan yang dinyatakan tidak valid, pada tingkat signifikansi 0,05. Terdapat 9 pernyataan indikator transparansi kebijakan publik dinyatakan valid karena memiliki korelasi antara masing-masing item pernyataan terhadap total skor item signifikan lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 (pernyataan 1, 3, 4, 5,6,7,8,9, dan 10). Hasil pengujian validitas terhadap variabel transparansi kebijakan publik dapat dilihat pada Tabel 6 di bawah.

Tabel 6.
Pengujian Validitas Data Transparansi Kebijakan Publik

No	Korelasi antara	Nilai Korelasi (Pearson Corellation)	Probabilitas Korelasi (Sig. 2-Tailed)	Kesimpulan
1	Pertanyaan 1 dengan Total	706**	0,000	Valid
2	Pertanyaan 2 dengan Total	069**	0,718	Tidak Valid
3	Pertanyaan 3 dengan Total	585**	0,001	Valid
4	Pertanyaan 4 dengan Total	425**	0,019	Valid
5	Pertanyaan 5 dengan Total	793**	0,000	Valid
6	Pertanyaan 6 dengan Total	720**	0,000	Valid
7	Pertanyaan 7 dengan Total	556**	0,001	Valid

No	Korelasi antara	Nilai Korelasi (Pearson Corellation)	Probabilitas Korelasi (Sig. 2-Tailed)	Kesimpulan
8	Pertanyaan 8 dengan Total	562**	0,001	Valid
9	Pertanyaan 9 dengan Total	757**	0,000	Valid
10	Pertanyaan 10 dengan Total	633**	0,000	Valid

Sumber : Data diolah, 2014

Pernyataan yang tidak valid adalah butir pernyataan 2 dengan probabilitas korelasi sebesar 0,718 atau lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Dalam pengujian selanjutnya item pernyataan yang tidak valid dikeluarkan dari pengujian sehingga dalam pengujian hipotesis hanya menggunakan sembilan indikator pernyataan dari variabel transparansi kebijakan publik.

Pengujian Reliabilitas

Tabel 7 di bawah menunjukkan bahwa hasil pengujian dari 30 data responden terhadap variabel pengetahuan dewan tentang anggaran diperoleh nilai **Cronbach's Alpha** sebesar 0,85 menunjukkan Reliabilitas alat ukur dalam penelitian sudah termasuk tinggi. Sekaran (2000) menyatakan bahwa semakin dekat koefisien alpha pada nilai 1 berarti butir-butir pertanyaan dalam koefisien semakin realibel.

Tabel 7.
Pengujian Reliabilitas Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran
Case Processing Summary

		N	(%)
Cases	Valid	30	100,0
	Excluded(a)	0	.0
	Total	30	100,0

a Listwise deletion based on all variabels in the procedure

Reability Statistics

Cronbach's Alpha	N of items
.815	10

Sumber : Data diolah, 2014

Pengujian reliabilitas terhadap variabel partisipasi masyarakat ditunjukkan pada Tabel 8 di bawah. Dari 30 data persepsi responden terhadap partisipasi masyarakat, Diperoleh nilai **Cronbach's Alpha** sebesar 0,854. Hasil ini menunjukkan bahwa Reliabilitas alat ukur untuk variabel partisipasi masyarakat dalam penelitian ini termasuk tinggi. Untuk mengetahui tingkat Reliabilitas dari alat ukur, maka besarnya nilai alpha yang dihasilkan dibandingkan dengan indeks: >0,800: tinggi; 0,600-0,799: sedang; <0,600: rendah (Sekaran, 2000).

Tabel 8.
Pengujian Reliabilitas Partisipasi Masyarakat
Case Processing Summary

		N	(%)
Cases	Valid	30	100,0
	Excluded(a)	0	.0
	Total	30	100,0

a Listwise deletion based on all variabels in the procedure

Reability Statistics

Cronbach's Alpha	N of items
.854	11

Sumber : Data diolah, 2014

Pengujian reliabilitas terhadap variabel transparansi kebijakan publik ditunjukkan pada Tabel 9 di bawah. Dari 30 data persepsi responden terhadap partisipasi masyarakat, Diperoleh nilai **Cronbach's Alpha** sebesar 0,854. Hasil ini menunjukkan bahwa Reliabilitas alat ukur untuk variabel transparansi kebijakan publik dalam penelitian ini termasuk

tinggi. Untuk mengetahui tingkat Reliabilitas dari alat ukur, maka besarnya nilai alpha yang dihasilkan dibandingkan dengan indeks: >0,800: tinggi; 0,600-0,799: sedang; <0,600: rendah, (Sekaran, 2000).

Tabel 9.
Pengujian Reliabilitas Partisipasi Masyarakat
Case Processing Summary

		N	(%)
Cases	Valid	30	100,0
	Excluded(a)	0	.0
	Total	30	100,0

a Listwise deletion based on all variabels in the procedure

Reability Statistics

Cronbach's Alpha	N of items
.737	10

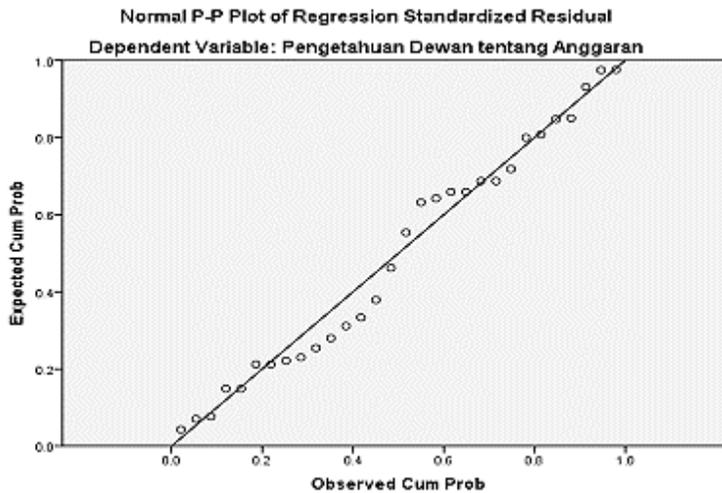
Sumber : Data diolah, 2014

4. Pengujian Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2005), uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi variabel bebas dan variabel terikat keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau Metode grafik yang digunakan adalah dengan melihat *Normal Probability Plot*. Berdasarkan gambar 2 dapat dilihat menunjukkan bahwa data yang digunakan berdistribusi normal sehingga dapat dianalisa data lebih lanjut. Selain itu dapat digunakan Uji Kolgomorov Smirnov.

Gambar 2.
Hasil Uji Normalitas Normal Plots



Tabel 10.
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Partisipasi Masyarakat	Transparansi Kebijakan Publik	Pengetahuan Dewan tentang Anggaran
N		30	30	30
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	32.7333	37.2000	34.2000
	Std. Deviation	4.51765	4.07177	4.41315
Most Extreme Differences	Absolute	.186	.191	.158
	Positive	.186	.136	.158
	Negative	-.147	-.191	-.092
Kolmogorov-Smirnov Z		1.019	1.048	.863
Asymp. Sig. (2-tailed)		.251	.222	.445

a. Test distribution is Normal; b. Calculated from data

Sumber : Data diolah, 2014

b. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah keadaan dimana antara dua variabel independen atau lebih pada model regresi terjadi hubungan linier yang sempurna. Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas

(independen) atau tidak. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas yaitu dengan melihat nilai Tolerance dan VIF, apabila nilai Tolerance $>0,10$ atau sama dengan VIF <10 berarti tidak terjadi Multikolinearitas (Ghozali, 2005).

Tabel 10.
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1. (Constant) Transparansi Kebijakan Publik	1.000	1.000

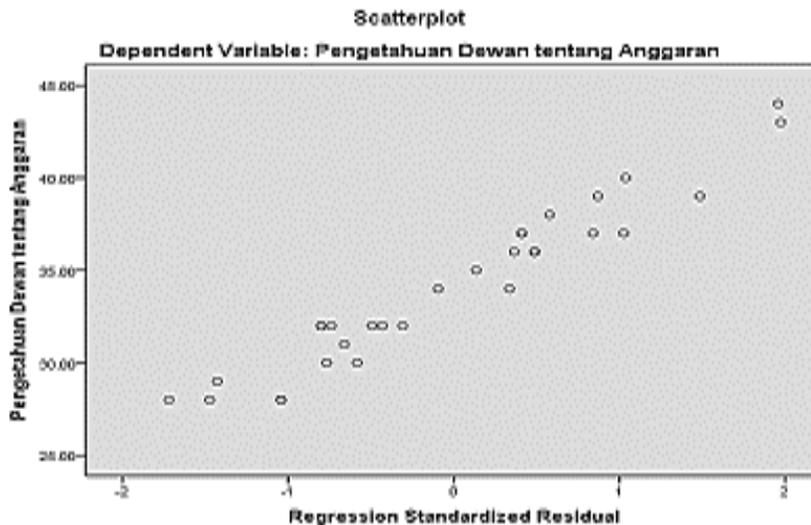
Sumber : Data diolah, 2014

Berdasarkan tabel 10 dapat dilihat bahwa model regresi tidak mengalami masalah multikolinearitas. Hal ini dapat diketahui dengan melihat nilai tolerance masing - masing variabel bebas yang dimana lebih besar dari 0,1 dan hasil perhitungan VIF masing-masing variabel bebas kurang dari 10. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terjadi masalah multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana terjadinya ketidaksamaan varian dari residual pada model regresi. Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas yaitu dengan melihat pola titik - titik pada scatterplots regresi. Dari Scatterplots di atas menunjukkan bahwa titik-titik menyebar dengan pola yang tidak jelas diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi penelitian ini tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Scatterplots penelitian dapat dilihat pada output regresi yang disajikan pada gambar 3 berikut ini:

Gambar 3.
Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Data diolah, 2014

5. Pengujian Hipotesis

Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi. Analisis regresi digunakan untuk mengetahui pengaruh transparansi kebijakan publik terhadap pengetahuan dewan tentang anggaran dan untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat dalam memoderasi hubungan antara transparansi kebijakan publik dengan pengetahuan dewan tentang anggaran di Kabupaten Keerom. Semua teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan program komputer SPSS versi 17 for windows.

a. Pengujian Hipotesis Pertama

Hipotesis pertama yang akan diuji dalam penelitian ini adalah pengaruh transparansi kebijakan publik terhadap pengetahuan dewan tentang anggaran. Analisis yang digunakan adalah regresi sederhana, dengan variabel bebas (independen) adalah transparansi kebijakan publik dan variabel terikat adalah pengetahuan dewan tentang anggaran (dependen). Adapun hasil ringkasan pengujian

regresi terhadap hipotesis pertama ditunjukkan pada Tabel 11 di bawah.

Tabel 11.
Ringkasan Hasil Uji Regresi terhadap Hipotesis Pertama

Keterangan	Koefisien B	Signifikansi
<i>Constant</i>	24,23	0,003
Transparansi Kebijakan Publik	0,268	0,188
R	0,247	
Koefisien Determinasi (R ²)	0,061	
F-Hitung	1,822	
T-Hitung	1,350	
Signifikansi	0,05	

Sumber : Data diolah, 2014

Berdasarkan hasil pengujian regresi pada Tabel 11 di atas, maka dapat disusun persamaan regresi sederhana sebagai berikut:

$$Y = 24,23 + 0,268X_1 + \epsilon$$

Keterangan:

Y = Pengetahuan dewan tentang anggaran

a = Bilangan konstanta

Pi = Koefisien variabel transparansi kebijakan publik

s = Standar Error

X₁ = Transparansi kebijakan publik

1) Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi ini digunakan untuk menguji model regresi, yang bertujuan untuk menentukan kuat lemahnya pengaruh variabel independennya yaitu transparansi kebijakan publik terhadap variabel dependen, pengetahuan dewan tentang anggaran. Hasil pengujian regresi (Tabel 11) menunjukkan nilai R Square sebesar 0,061, artinya hanya 6,1% pengetahuan dewan tentang anggaran dapat dijelaskan oleh variabel transparansi kebijakan publik, sedangkan sisanya sebesar

93,9% dijelaskan oleh variabel di luar model. Kemampuan variabel bebas menjelaskan variabel terikat pada penelitian ini tergolong rendah.

2) Uji Parsial (t-test)

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial terhadap variabel transparansi kebijakan publik sebagaimana diringkas pada Tabel 12 di bawah, ditunjukkan nilai t hitung sebesar 1,350 dengan signifikansi sebesar 0,188. Nilai signifikansi dari hasil pengujian lebih besar dibandingkan dengan tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini ($\alpha=0,05$), sehingga disimpulkan bahwa hipotesis penelitian transparansi kebijakan publik berpengaruh terhadap pengetahuan dewan tentang anggaran tidak terdukung.

Tabel 12.
Hasil Uji Parsial Variabel Transparansi Kebijakan Publik

Hipotesis	Nilai	Kesimpulan
<ul style="list-style-type: none"> ▪ $H_0: \beta_1 = 0$ (transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengetahuan dewan tentang anggaran) ▪ $H_0: \beta_1 \neq 0$ (transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengetahuan dewan tentang anggaran) 	t hitung = 1,350 Sig = 0,188	Hipotesis penelitian (H_a) tidak terdukung (Nilai signifikansi pengujian lebih besar dari 0,05)

Sumber : Data diolah, 2014

b. Pengujian Hipotesis Kedua

Hipotesis kedua yang akan diuji dalam penelitian ini adalah pengaruh positif variabel partisipasi masyarakat terhadap hubungan antara transparansi kebijakan publik dengan pengetahuan dewan tentang anggaran. Untuk menarik kesimpulan digunakan analisis regresi dengan melakukan interaksi antara variabel transparansi kebijakan publik dan partisipasi masyarakat. Variabel bebas (independen)

dalam penelitian ini adalah transparansi kebijakan publik dan variabel terikat adalah pengetahuan dewan tentang anggaran (dependen), sedangkan variabel partisipasi masyarakat digunakan sebagai variabel moderasi. Fungsi variabel moderasi adalah untuk memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel transparansi kebijakan publik dengan pengetahuan dewan tentang anggaran. Adapun hasil ringkasan pengujian regresi terhadap hipotesis kedua ditunjukkan pada Tabel 13 di bawah.

Tabel 13.
Hasil Uji Regresi terhadap Hipotesis Kedua

Keterangan	Koefisien B	Sig	t-hitung
<i>Constant</i>	114,094	0,011	2,743
Transparansi Kebijakan Publik (X ₁)	0,268	0,188	1,350
Partisipasi Masyarakat (X ₂)	0,631	0,000	4,480
Interaksi X ₁ X ₂	0,82	0,023	2,417
R	: 0,725a		
Koefisien Determinasi (R ²)	: 0,525		
F hitung	: 9,595		
Sig	: 0,000		
Tingkat signifikansi (α)	: 0,05		

Berdasarkan hasil pengujian regresi pada Tabel 3.15 di atas, maka dapat disusun persamaan regresi sederhana sebagai berikut:

$$Y = 114,094 + 0,268X_1 + 0,631X_2 + 0,82X_1X_2 + s$$

Keterangan:

- Y = Pengetahuan dewan tentang anggaran
- a = Bilangan konstanta
- P1 = Koefisien regresi variabel transparansi kebijakan publik (X₁)
- P2 = Koefisien regresi variabel partisipasi masyarakat (X₂)
- P3 = Koefisien regresi interaksi variabel X₁ dan X₂
- S = Standar Error
- X₁ = Transparansi kebijakan publik
- X₂ = Partisipasi Masyarakat
- X₁·X₂ = Interaksi variabel X₁ dan X₂

1) Uji F

Salah satu tujuan Uji F adalah untuk mengetahui apakah sebuah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi sebuah hubungan atau pengaruh antara variabel. Hasil pengujian regresi (Tabel 13) di atas, ditunjukkan nilai F-hitung sebesar 9,595 dengan signifikansi sebesar 0,000 jauh lebih kecil dibandingkan dengan tingkat signifikansi (α) yang digunakan dalam penelitian ini yakni 0,05. Berdasarkan hasil Uji F disimpulkan bahwa model regresi dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh variabel partisipasi masyarakat memoderasi hubungan antara transparansi kebijakan publik dengan pengetahuan dewan tentang anggaran

2) Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi ini digunakan untuk menguji model regresi yang bertujuan untuk menentukan kuat lemahnya pengaruh variasi variabel transparansi kebijakan publik, transparansi masyarakat, interaksi variabel partisipasi masyarakat dengan transparansi kebijakan publik terhadap variabel dependen yakni pengetahuan dewan tentang anggaran. Hasil pengujian regresi (Tabel 13) menunjukkan nilai R Square sebesar 0,525 artinya hanya 52,5% pengetahuan dewan tentang anggaran dapat dijelaskan oleh variabel transparansi kebijakan publik, transparansi masyarakat, interaksi variabel partisipasi masyarakat dengan transparansi kebijakan publik, sedangkan sisanya sebesar 47,5% dijelaskan oleh variabel diluar model. Kemampuan variabel bebas menjelaskan variabel terikat pada penelitian ini sudah tergolong tinggi.

3) Uji Parsial (t-test)

Hasil pengujian secara parsial terhadap pengaruh variabel partisipasi masyarakat dalam memoderasi hubungan antara transparansi kebijakan publik dengan pengetahuan dewan tentang anggaran diringkas pada Tabel 14 di bawah. Dari tabel tersebut ditunjukkan nilai t-hitung hasil interaksi variabel transparansi kebijakan publik dan partisipasi masyarakat sebesar 2,417 dengan signifikansi sebesar 0,023. Nilai signifikansi dari hasil pengujian lebih kecil dibandingkan dengan tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini ($\alpha=0,05$), sehingga disimpulkan bahwa hipotesis penelitian bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap hubungan antara transparansi kebijakan publik dengan pengetahuan dewan tentang anggaran terdukung.

Tabel 14.
Hasil Uji Parsial Variabel Partisipasi Masyarakat

Hipotesis	Nilai	Kesimpulan
<ul style="list-style-type: none">■ $H_0: \rho_1 = 0$ (partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap hubungan antara transparansi berpengaruh signifikan dengan pengetahuan dewan tentang anggaran)■ $H_a: \rho_1 \neq 0$ (partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap hubungan antara transparansi berpengaruh signifikan dengan pengetahuan dewan tentang anggaran)	t-hitung = 2,417 Sig = 0.023 Koefisien = 0,82	Hipotesis penelitian (H_a) terdukung (Nilai signifikansi pengujian lebih kecil dari 0,05)

6. Pembahasan Hasil Temuan

Berdasarkan hasil pengujian regresi sederhana terhadap hipotesis pertama disimpulkan bahwa transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh terhadap pengetahuan dewan tentang anggaran.

Demikian halnya dengan kondisi yang terjadi di Kabupaten Keerom prinsip-prinsip transparansi kebijakan publik yang meliputi pengumuman kebijakan anggaran kepada masyarakat, kemudahan masyarakat dalam mengakses dokumen publik tentang anggaran, pelaporan LKPJ tahunan dengan tepat waktu, menyebarluaskan keputusan melalui media massa dan media komunikasi, sosialisasi DPRD tentang perubahan kebijakan anggaran implementasinya masih dalam tahap formalitas.

Penerapan prinsip-prinsip transparansi kebijakan publik yang hanya di Kabupaten Keerom belum berdampak terhadap peningkatan pengetahuan dewan tentang pengawasan anggaran karena eksekutif terkesan menutup informasi tentang kebijakan maupun dokumen anggaran, hampir setiap tahun terjadi keterlambatan penyampaian dokumen DPA, dokumen anggaran lainnya serta keterlambatan penyampaian materi LKPJ tahunan sehingga berdampak pada keterbatasan waktu dalam melakukan pembahasan, keterbatasan informasi tentang anggaran dengan lambatnya DPA diserahkan ke DPRD, waktu pembahasan materi LKPJ tahunan menjadi sangat singkat sehingga tidak maksimal dan terkesan hanya formalitas.

Berdasarkan hasil pengujian regresi terhadap hipotesis kedua disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap hubungan antara transparansi kebijakan publik dengan pengetahuan dewan tentang pengawasan anggaran, artinya bahwa hubungan partisipasi kebijakan publik dengan pengetahuan dewan tentang pengawasan anggaran di Kabupaten Keerom diperkuat oleh partisipasi masyarakat.

Salah satu bentuk partisipasi masyarakat di Kabupaten Keerom adalah melalui metode penjangkaran aspirasi, kritik, serta masukan masyarakat melalui kegiatan reses yang dilakukan secara rutin oleh

DPRD. Partisipasi masyarakat ditandai dengan adanya keterwakilan masing-masing unsur yang memiliki peranan penting dalam pembangunan di masyarakat, seperti: kepala kampung, sekretaris kampung, tokoh agama, tokoh masyarakat, perwakilan kelompok tani, perwakilan karang taruna, perwakilan kelompok pengajian, dan perwakilan kantor distrik.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian regresi terhadap hipotesis penelitian dan pembahasan temuan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Hasil pengujian secara parsial pengaruh transparansi kebijakan publik terhadap pengetahuan dewan tentang anggaran diperoleh nilai terhitung sebesar 1,350 dengan signifikansi sebesar 0,188. Nilai signifikansi dari hasil pengujian lebih besar dibandingkan dengan tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini ($\alpha=0,05$), sehingga disimpulkan bahwa hipotesis penelitian transparansi kebijakan publik berpengaruh terhadap pengetahuan dewan tentang anggaran tidak terdukung. Kondisi ini menunjukkan bahwa transparansi kebijakan publik masih sebatas wacana dan implementasinya masih dalam tahap formalitas, karena fakta menunjukkan bahwa akses terhadap informasi kebijakan dan dokumen anggaran serta informasi publik lainnya masih sulit dan hanya dapat diakses oleh orang-orang tertentu, sehingga dokumen yang seharusnya dapat diakses oleh publik seolah-olah menjadi rahasia.

- b. Hasil pengujian regresi terhadap pengaruh variabel partisipasi masyarakat dalam memoderasi hubungan antara transparansi kebijakan publik dengan pengetahuan dewan tentang anggaran

diperoleh nilai t-hitung hasil interaksi variabel transparansi kebijakan publik dengan partisipasi masyarakat sebesar 2,417 dengan signifikansi sebesar 0,023. Nilai signifikansi dari hasil pengujian lebih kecil dibandingkan dengan tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini ($\alpha=0,05$), sehingga disimpulkan bahwa hipotesis penelitian bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap hubungan antara transparansi kebijakan publik dengan pengetahuan dewan tentang anggaran terdukung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki peranan yang sangat penting untuk meningkatkan transparansi kebijakan publik yang selama ini masih pada tahap formalitas, dan pada akhirnya akan meningkatkan pengetahuan dewan tentang pengawasan anggaran di Kabupaten Keerom.

2. Saran-saran

Adapun saran-saran penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel-variabel lain yang berpengaruh terhadap pengetahuan dewan tentang anggaran serta menambah sampel penelitian.
- b. Bagi pemerintah agar meningkatkan transparansi kebijakan publik, sedangkan bagi DPRD agar memperhatikan partisipasi masyarakat dalam proses penganggaran guna memperoleh informasi-informasi yang penting dalam rangka pengawasan anggaran yang lebih maksimal

DAFTAR PUSTAKA

Mardiasmo. 2001. *Pengawasan, Pengendalian dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Andi. Jogjakarta

..... 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Jogjakarta

- 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi. Jogjakarta\
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang No. 17 tahun 2004 tentang Keuangan Negara*. Tamita Utama. Jakarta
- 2004. *Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*. Pustaka Pergaulan. Jakarta
- 2004. *Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*. Pustaka Pergaulan. Jakarta
- 2011. *Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Online. <http://www.dispenda.jabarprov.go.id/system/application/views/e-learning/download/Permendagri21Tahun2011.pdf>
- Setyawati, Yuni. 2010. *Pengaruh Pengetahuan Anggaran Anggota Dewan Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Dengan Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Variabel Pemoderasi di Karesidenan Surakarta*. Tesis Universitas Sebelas Maret. <http://eprints.uns.ac.id/6450/1/139181108201004381.pdf>
- Sopannah. 2003. *Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah*. Tesis UGM. Paper disajikan pada SNA VI Surabaya
- Werimon, Simson. 2005. *Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) di Provinsi Papua*. Tesis Universitas Diponegoro. http://eprints.undip.ac.id/18098/1/Simson_Werimon.pdf